

Model MSN Approach dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

M. Daimul Abror¹⁾, Rasyadan Taufiq Probojati²⁾

¹⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kediri

²⁾ Fakultas Pertanian, Universitas Kediri

¹⁾ daimabrор@unik-kediri.ac.id, ²⁾ rasyadant@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan menginterpretasikan implementasi pengelolaan sampah di Kabupaten Nganjuk dengan fokus pada perspektif *Mentality-Approach*, *Systems-Approach*, dan *Networking-Approach*. Pengumpulan data menggunakan empat instrumen utama meliputi observasi, wawancara, FGD, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek *mentality approach* aspek perilaku, sikap, dan tanggungjawab dari pihak aparat pemerintah (DLH, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan) terkait pengelolaan sampah di kecamatan nganjuk sudah mengarah pada sikap peduli akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, perilaku yang bertanggungjawab dengan mengawal dan mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Recycle, Re-Use*). Sedangkan dari sisi warga ditemukan fakta yang beragam terkait diberlakukannya Perda pengelolaan sampah ini. Sedangkan dalam aspek *system approach* menunjukkan fakta bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Nganjuk sudah cukup jelas dalam aspek regulasinya mengacu pada PERDA Nganjuk nomor 01 tahun 2015. Sedangkan aspek *networking approach* menunjukkan fakta bahwa kemitraan strategis dalam implementasi Kebijakan pengelolaan sampah terlihat pada adanya titik temu kepentingan antara pihak pemerintah kabupaten melalui DLH, pemerintah kecamatan melalui kelurahan-kelurahan yang ada dan masyarakat melalui keberadaan bank sampah yang tersebar di seluruh Desa.kelurahan di wilayah Kecamatan Nganjuk. Meskipun belum menunjukkan sinergitas dan simbiosis mutualisme yang maksimal.

Kata Kunci: *MSN Approach, Implementasi Kebijakan, Pengelolaan Sampah*

Abstract

This study aims to analyze, describe and interpret the implementation of waste management in Nganjuk Regency with a focus on the perspectives of Mentality-Approach, Systems-Approach, and Networking-Approach. Data collection uses four main instruments including observation, interviews, FGD, and documentation. Data analysis uses an interactive data analysis model developed by Miles, Huberman, and Saldana. The results showed that in the mentality approach aspect aspects of behavior, attitudes and responsibilities of the government apparatus (DLH, District and Kelurahan Government) regarding waste management in the Nganjuk sub-district have led to a caring attitude about the importance of keeping the environment clean, responsible behavior by overseeing and educating the public regarding waste management using the 3R method (reduce, recycle, re-

use). Meanwhile, from the side of the residents, various facts were found related to the enactment of this regional regulation on waste management. Whereas the system approach aspect shows the fact that the implementation of the Waste Management policy in Nganjuk District is quite clear in the regulatory aspect referring to the Nganjuk PERDA number 01 of 2015. Meanwhile the networking approach aspect shows the fact that strategic partnerships in the implementation of the waste management policy are seen in the meeting point of interests between the district government through DLH, the sub-district government through the existing sub-districts and the community through the existence of waste banks scattered throughout the villages in the Nganjuk sub-district. Although it has not shown maximum mutualism synergy and symbiosis.

Keywords: MSN Approach, Public Policy, Waste Management

A. LATAR BELAKANG

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis jumlah sampah tahun 2020 di 384 kota di Indonesia mencapai 80.235,87 ton tiap hari. Sampah tersebut sebesar 4,2% diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sebanyak 37,6% dibakar, dibuang ke sungai sebesar 4,9% dan tidak tertangani sekitar 53,3%. 53,3% sampah yang tidak tertangani dibuang dengan cara tidak saniter, dan berdasarkan hasil penelitian, setiap penduduk kota besar rata-rata memproduksi sampah organik dan anorganik sekitar 0,75 kg per hari (UMSU, 2019) Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan tahun 2020, setiap warga Kabupaten Nganjuk menghasilkan 0,7 kg sampah per hari. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk saat ini maka sampah yang di hasilkan setiap warganya lebih kurang 48.000 ton (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal, 2020). Fakta bawa setelah 6 Tahun Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2015 ini ditetapkan, masyarakat Kecamatan Nganjuk dikejutkan dengan banjir yang melanda secara tiba tiba, dikarenakan peran serta masyarakat yang masih minim dalam pembuangan sampah pada tempatnya.

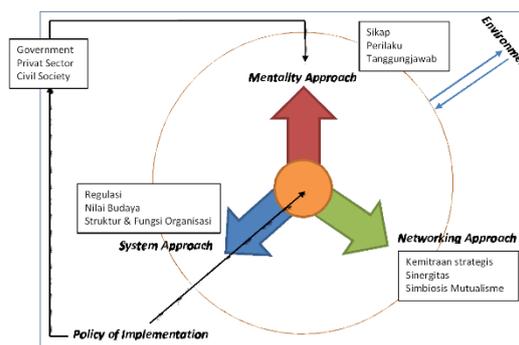
Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mendeskripsikan menganalisis, dan menginterpretasikan Model *MSN Approach* dalam implementasi Pengelolaan sampah di Kabupaten Nganjuk yang menggambarkan adanya kolaborasi aktif dari stakeholders pengelola sampah. Penelitian ini layak dilaksanakan karena memberikan kontribusi pada pemerintah kabupaten Nganjuk dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Nganjuk dengan optimalisasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2015 dengan menganalisis aspek *mentality approach*, *system approach*, dan *networking approach* (Kadji, 2015). Pendekatan ini belum pernah ditemukan dalam kajian implementasi kebijakan pengelolaan sampah, dimana hasil penelitian tentang implementasi pengelolaan sampah masih menggunakan pendekatan-pendekatan tradisonal. Diantaranya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Kebershan di Kota Manado (Liando & Sampe, 2017), Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah melalui Bank Sampah di Kabupaten Purbalingga (Cahyadi et al., 2018), Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Manado (Mokodompis et al., 2019),

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus (Wachid & Laksamana Caesar, 2020), Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe (Zahara et al., 2021), dan Determinan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Kudus (Sari et al., 2022).

B. LANDASAN TEORITIS

Dalam penelitian ini, model implementasi kebijakan publik yang digunakan adalah model yang dikembangkan oleh Yulianto Kadji seorang guru besar bidang kebijakan publik dari Universitas Gorontalo. Model *MSN approach* implementasi kebijakan publik ini mengedepankan adanya jejaring kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat yang difokuskan pada tiga pendekatan utama, yakni meliputi *mentality approach*, *system approach*, dan *networking approach* (Kadji, 2015).

Secara terperinci untuk *mentality approach* diarahkan pada tiga indikator utama, yakni sikap, perilaku, dan tanggungjawab. Sedangkan *system approach* diarahkan pada tiga indikator utama, yakni sistem regulasi, sistem nilai budaya, dan sistem struktur dan fungsi organisasi. Adapun *networking approach* lebih diarahkan pada tiga indikator utama, yakni kemitraan strategis, sinergitas, dan simbiosis mutualisme. Gambaran ringkas model *MSN approach* dalam implementasi Kebijakan Publik adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Model MSN Approach Implementasi Kebijakan Publik

Sumber: Kadji, 2015

C. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilakukan di kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk karena merupakan kawasan perkotaan yang padat penduduk dan merupakan pusat pasar tradisional. Fokus penelitian ini diarahkan pada tiga pendekatan utama, yakni *mentality approach*, *system approach*, dan *networking approach*. Informan yang dipilih adalah Kepala Seksi Pengelolaan Sampah DLH Kabupaten Nganjuk, Camat Nganjuk, Lurah di wilayah Kecamatan Nganjuk, Ketua bank sampah di 12 Kelurahan wilayah kecamatan Nganjuk, dan masyarakat di wilayah kecamatan nganjuk. Pengumpulan data menggunakan empat instrumen utama, yakni observasi, FGD, Wawancara, dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014).

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Terdapat beberapa aspek dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Nganjuk, diantaranya:

1. *Mentality Approach*

Berdasarkan data dari hasil wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi di lapangan ditemukan fakta bahwa perilaku, sikap, dan tanggungjawab dari pihak aparat pemerintah (DLH, Pemerintah Kecamatan, dan Kelurahan) terkait pengelolaan sampah di kecamatan Nganjuk sudah mengarah pada sikap peduli akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, perilaku yang bertanggungjawab dengan mengawal dan mengedukasi masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*). Sedangkan dari sisi warga ditemukan fakta yang beragam terkait diberlakukannya Perda pengelolaan sampah ini. Dimana para pengurus bank sampah yang tersebar di Kecamatan Nganjuk cukup antusias dalam menyambut adanya regulasi ini dengan intens berkoordinasi dengan DLH dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*) di Kecamatan Nganjuk. Begitu juga warga di sebagian RW di beberapa kelurahan juga antusias atas edukasi yang diberikan oleh pihak DLH dan pengurus bank sampah tersebut. Meskipun realitanya juga masih ada sikap, perilaku dari sebagian masyarakat di beberapa kelurahan yang masih cuek dan acuh terhadap pentingnya pemilahan sampah. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya sampah organik dan an-organik yang dibuang jadi satu dalam satu kresek merah oleh warga di TPS masing-masing kelurahan.

Realitas tersebut jika didialogkan dengan pendapatnya Kadji (2015:89-90) yang menyatakan bahwa *mentality approach* dalam implemementasi kebijakan terwujud dalam perubahan sikap, perilaku, dan tanggungjawab yang lebih baik dan positif dari *stakeholders* kebijakan. Dari

aspek ini dapat dianalisis bahwa pada aspek sikap spiritual sebenarnya baik dari pihak pemerintah dan masyarakat sudah menyadari akan pentingnya hidup bersih karena kepercayaan masyarakat bahwa hidup bersih itu sebagian dari iman. Namun dari aspek sikap sosial, dari sebagian warga masih menunjukkan sikap a-toleran dengan acuh terhadap edukasi yang diberikan oleh pihak pemerintah dan bank sampah dalam pengelolaan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*). Hal ini berdampak pada masih menumpuknya sampah di TPS yang kondisinya bercampur antara sampah organik dan sampah an-organik.

Bertolak belakangnya sikap dari pihak pemerintah dan masyarakat ini berimbas pada aspek perilaku. Dimana perilaku masyarakat yang masih gemar membuang sampah jadi satu tanpa memilah dahulu berdasarkan kategori sampah organik dan an-organik. Kondisi ini juga diperparah dengan petugas sampah yang hanya mengangkut sampah tersebut dari TPS ke TPA tanpa mengingatkan warga akan pentingnya memilah sampah dahulu. Meskipun dalam beberapa kesempatan pihak pemerintah dan bank sampah sudah menghimbau dan mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah dari sumbernya.

Terfragmentasinya perilaku pengelolaan sampah ini berakibat pada tanggungjawab yang harus dijalankan oleh *stakeholders* kebijakan ini. Dimana pihak pemerintah dalam hal ini DLH yang sudah menyediakan sarana bak sampah berdasarkan kategori sampah dan fasilitas pengolah sampah yang tersedia di TPS maupun TPA kurang diimbangi dengan intensitas edukasi dan pembinaan secara berlanjut dari pihak kecamatan dan kelurahan terhadap warga. Sehingga beban tanggungjawab kebersihan lingkungan tertumpu pada keberadaan bank sampah

yang harus memilah sampah tersebut di TPS. Sehingga sirkulasi pengelolaan sampah menjadi tidak berjalan lancar dan pengurangan timbunan sampah di TPA hanya berkurang sekitar 2%. Karena yang dipilah hanya terbatas pada sampah an-organik yang bernilai ekonomis.

2. System Approach

Berdasarkan data dari hasil wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi di lapangan ditemukan fakta bahwa dalam *system approach* implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Nganjuk sudah cukup jelas dalam aspek regulasinya mengacu pada PERDA Nganjuk nomor 01 tahun 2015. Dalam regulasi ini secara substansif mencerminkan adanya pengakomodiran terhadap kepentingan publik, menggugah partisipasi masyarakat, dan meningkatkan produktivitas layanan publik secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang berkaitan dengan nilai budaya hidup bersih masih menjadi permasalahan karena belum semua masyarakat menyadari pentingnya hidup bersih dan asri sebagaimana tertuang dalam target program Kelurahan BERSERI di setiap kelurahan yang tersebar di Kecamatan Nganjuk. Sedangkan dalam aspek fungsi dan struktur organisasi pelaksana kebijakan pengelolaan sampah di setiap Kelurahan yang tersebar di wilayah kecamatan Nganjuk sudah cukup bagus. Namun masih terfokus pada pemanfaatan sampah an-organik yang bernilai ekonomis, dimana masyarakat bisa menjual sampah tersebut ke bank sampah yang ada. Begitu juga masyarakat diajari membuat kreasi dari sampah an-organik tersebut guna meningkatkan nilai ekonomis sampah tersebut.

Realitas tersebut jika didialogkan dengan pendapatnya Kadji (2015:89-90)

yang menyatakan bahwa *system approach* dalam implementasi kebijakan terwujud dalam system regulasi, nilai budaya dan fungsi & struktur organisasi dari *stakeholders* kebijakan ini. Dimana dalam system regulasi harus mengakomodir kepentingan publik, partisipasi publik, peningkatan produktivitas layanan publik. Sedangkan dalam aspek nilai budaya harus mencerminkan adanya kearifan lokal, kekerabatan, dan kegotongroyongan diantara *stakeholders* kebijakan. Adapun dalam aspek system struktur dan fungsi organisasi harus mencerminkan interaksi, interdependensi, dan integritas dari *stakeholders* kebijakan. Dari aspek ini dapat dianalisis bahwa pada aspek system regulasi sudah memenuhi asas kepentingan dan partisipasi publik serta peningkatan produktivitas layanan publik. Dimana dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 tahun 2015 secara eksplisit disebutkan bahwa Perda ini bertujuan untuk a) meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan di daerah; b). memanfaatkan sampah sebagai sumber daya; dan c). meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di daerah.

Sedangkan dalam aspek nilai budaya yang terbangun dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini sudah memenuhi asas kearifan lokal dan kekerabatan. Hal ini tercermin dari terbentuknya Bank Sampah di setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Nganjuk yang penamaan bank sampahnya menggambarkan ciri khas dan nilai luhur masing-masing kelurahan di wilayah kecamatan nganjuk. Sedangkan secara structural, keanggotaan bank sampah juga menunjukkan adanya system kekerabatan dimana semua anggotanya adalah kader lingkungan yang merupakan warga asli masing-masing kelurahan. Kondisi ini

mendorong para kader lingkungan untuk lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan masing-masing kelurahan sebagai sebuah kerabat/keluarga besar. Namun jika dianalisis dari aspek kegotongroyongan ternyata masih menimbulkan permasalahan. Dimana yang berperan aktif masih didominasi oleh pihak bank sampah. Sedangkan masyarakat sebagian masih kurang proaktif bahkan sebagian cenderung acuh terhadap kebersamaan menjaga kebersihan lingkungan dengan tetap membuang sampah tanpa memilah dulu dari rumah masing-masing. Begitu juga dari pihak pemerintah dalam hal ini DLH masih sebatas menyediakan sarana dan prasarana tempat sampah sesuai kategori sampah, sarana pengolah sampah, dan penyediaan TPS dan TPA.

Adapun dari aspek system struktur dan fungsi organisasi *stakeholders* kebijakan ini jika dianalisis sudah menunjukkan adanya interaksi, interdependensi dan integritas meskipun pada skala yang sangat terbatas. Dimana pada aspek interaksi antara masyarakat dan bank sampah sudah cukup baik namun belum maksimal dalam menerapkan pengolahan sampah dengan metode 3R (*Reduce, Recycle, Reuse*). Metode yang digunakan masih sebatas memilah dan memanfaatkan sampah an-organik, sehingga timbulan sampah tidak banyak berkurang secara signifikan. Pemilahan tersebut juga masih didominasi oleh peran bank sampah yang melakukannya di TPS bukan dipilah langsung oleh warga dari sumbernya atau rumah masing-masing.

Sedangkan interaksi antara bank sampah dengan pihak pemerintah hanya sebatas koordinasi terkait pengesahan legalitas struktur organisasi bank sampah. Belum sampai pada pembinaan yang intensif dan berkelanjutan dari pemerintah

terhadap eksistensi dan peran aktif bank sampah. Adapun interaksi antara pemerintah keluraha, kecamatan dan DLH masih sebatas pada pemenuhan terhadap sarana dan prasarana pengelolaan sampah baik berupa bak sampah, mesin pengolah sampah, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) maupun Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Secara lebih jauh belum ada interaksi dan interdependensi serta integritas yang terbangun secara integratif, baik antar bank sampah yang tersebar di kelurahan di wilayah kecamatan nganjuk, antara bank sampah dengan pihak kelurahan, kecamatan maupun kabupaten dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

3. *Networking Approach*

Berdasarkan data dari hasil wawancara, observasi, FGD, dan dokumentasi di lapangan ditemukan fakta bahwa dalam *networking approach* implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Nganjuk bahwa kemitraan strategis dalam implementasi Kebijakan pengelolaan sampah terlihat pada adanya titik temu kepentingan antara pihak pemerintah kabupaten melalui DLH, pemerintah kecamatan melalui kelurahan-kelurahan yang ada dan masyarakat melalui keberadaan bank sampah yang tersebar di seluruh Desa.kelurahan di wilayah kecamatan Nganjuk. Namun kemitraan strategis tersebut belum menumbuhkan sinergitas yang baik dari semua pihak, karena terkesan masing-masing pihak masih berjalan sendiri-sendiri. Sehingga simbiosis mutualisme yang terbangun hanya terbatas pada bertemunya kepentingan antara warga masyarakat dan pihak bank sampah berkaitan dengan sampah an-organik yang bernilai ekonomis. Sedangkan sampah organik masih menjadi

residu yang dibuang ke TPS dan berakhir di TPA.

Realitas tersebut jika didialogkan dengan pendapatnya Kadji (2015:89-90) yang menyatakan bahwa *networking approach* dalam implemetasi kebijakan seyogyanya mengedepankan terwujudnya kemitraan strategis, semangat sinergitas dan jejaring kerjasama antar stakeholder kebijakan publik, dimana dalam kemitraan strategis harus berpegang pada prinsip kerjasama, kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan. Sedangkan dalam aspek sinergitas harus mampu membangun sinergitas dalam aspek kelembagaan, kebijakan dan penganggaran program, sumberdaya manusia, data informasi dan strategi monev terhadap kebijakan dan program. Adapun dalam aspek simbiosis mutualisme harus didasarkan pada prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan saling mendukung. Dari pendekatan ini dapat dianalisis bahwa pada aspek kemitraan strategis sudah terjalin antara DLH, pemerintah kecamatan melalui kelurahan-kelurahan yang ada dan masyarakat melalui keberadaan bank sampah yang tersebar di seluruh desa.

Kelurahan di wilayah Kecamatan Nganjuk, meskipun prinsip-prinsip kerjasama, kesetaraan, keterbukaan dan saling menguntungkan diantara stakeholder kebijakan tersebut belum berjalan maksimal. Dimana belum ada kerjasama yang integratif antar bank sampah yang tersebar di kecamatan nganjuk. Kerjasamanya masih bersifat parsial, yakni antara bank sampah dengan warga di setiap kelurahan dalam bentuk pemilahan sampah an-organik yang bernilai ekonomis, dan kerjasama antara bank sampah dengan pihak kelurahan, kecamatan dan DLH dalam bentuk legalitas kepengurusan bank sampah dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Begitu juga

dari aspek kesetaraan, peran pengelolaan sampah masih didominasi oleh masing-masing bank sampah di tiap kelurahan. Sedangkan pihak kelurahan dan kecamatan hanya berperan dalam hal legalitas bank sampah dengan menetapkan SK kepengurusan Bank Sampah di masing-masing kelurahan. Dimana sejak tahun 2013 hingga 2019 sudah terbentuk 12 bank sampah unit yang tersebar di 12 kelurahan di wilayah Kecamatan Nganjuk. Adapun pihak DLH hanya sebatas menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di tiap kelurahan di wilayah kecamatan. Dimana sekarang di Kecamatan Nganjuk sudah dibangun 1 TPST di Kelurahan Kartoharjo dan 3 TPS3R di Kelurahan Payaman, kelurahan Gunungkidul, dan Kelurahan Jatirejo Serta 1 TPA di desa Kedungdowo. Sedangkan dari aspek keterbukaan dan saling menguntungkan masih sebatas dilaksanakan oleh masing-masing bank sampah dengan warga penjual sampah an-organik yang bernilai ekonomis. Dimana masyarakat bisa menjual sampah an-organiknya ke bank sampah dengan kategori rongsonkan seharga 500 - 800 per kilogram dan botol plastik seharga 2.200 – 4.000 perkilogram serta hasil kreasi dari aur ulang sampah yang bernilai ekonomis cukup tinggi mulai dari harga 15.000/barang hingga 250.000/barang.

Sedangkan dalam aspek sinergitas menunjukkan bahwa pada kelembagaan yang terlibat aktif hanya bank sampah di masing-masing kelurahan. Belum terwujudnya sinergitas kelembagaan yang integratif antara bank sampah unit, bank sampah induk, DLH, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta masyarakat wilayah kecamatan nganjuk menjadikan pengelolaan sampah masih dilakukan secara parsial di masing-masing desa/kelurahan. Hal ini berdampak pada

kebijakan dan penganggaran program yang masih berfokus pada pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta legalisasi bank sampah yang sudah terbentuk di masing-masing desa/keluraha. Adapun anggaran dan program yang lebih mengarah pada pembinaan sumberdaya manusia masih belum optimal. Fakta ini mengakibatkan movev terhadap kebijakan dan program sampai saat ini masih didominasi monev administratif.

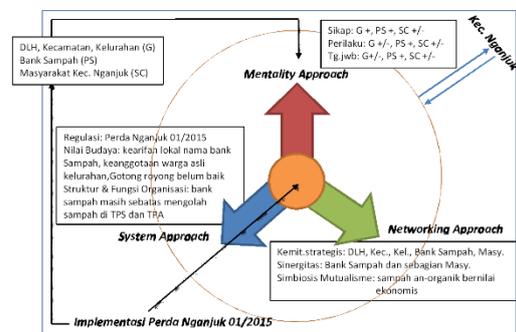
Sedangkan pada aspek simbiosis mutualisme sudah menunjukkan pemenuhan aspek saling membutuhkan, saling menguntungkan dan saling mendukung, meskipun masih sebatas pada simbiosis mutualisme antara bank sampah dan masyarakat dalam bentuk jual beli sampah an-organik yang dilakukan oleh kedua pihak

E. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Model yang terbangun dari implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kecamatan nganjuk menunjukkan bahwa bahwa dari pendekatan mentalis sikap pemerintah (DLH, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) dan privat sector (bank sampah) menunjukkan perubahan yang positif, sedangkan sikap masyarakat ada yang positif dan negatif. Adapun perilaku privat sector (bank sampah) menunjukkan perubahan positif, sedangkan perilaku pemerintah (DLH, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) dan masyarakat ada yang positif dan negatif. Adapun tanggungjawab privat sector (bank sampah) menunjukkan perubahan positif, sedangkan tanggungjawab pemerintah (DLH, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan) dan masyarakat ada yang positif dan negatif. Untuk pendekatan sistem menunjukkan

bahwa regulasi yang digunakan sudah jelas yakni Perda Nganjuk 01 tahun 2015.

Adapun nilai budaya menunjukkan adanya nilai kearifan lokal pada penamaan bank sampah dan keanggotaan pengurus bank sampah menunjukkan nilai kekerabatan karena semua berasal dari warga asli masing-masing desa/kelurahan. Sedangkan struktur dan fungsi organisasi masih sebatas pengolahan sampah di TPS dan TPA. Untuk pendekatan jejaring kerjasam menunjukkan adanya kemitraan strategis antara pemerintah (DLH, Kecamatan, Desa/Kelurahan) privat sector (bank sampah) dan masyarakat. Meskipun belum ada sinergitas dan simbiosis mutualisme yang maskimal. Dimana sinergitas hanya terbangun antara pihak bank sampah dan masyarakat dalam pemilahan sampah an-organik yang bernilai ekonomis. Secara ringkas model eksisting yang terbangun digambarkan sebagai berikut:



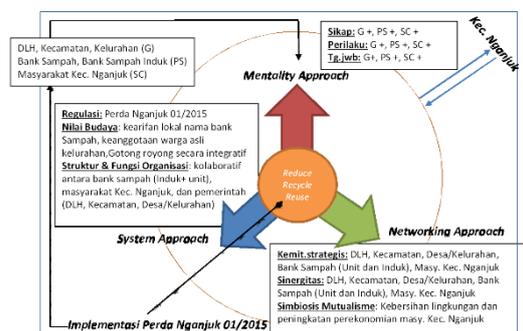
Gambar 5.1. Model Eksisting Pengelolaan Sampah Perspektif Mentalis, Sistem, dan Jejaring Kerjasama

Sumber: Hasis Analisis Peneliti, 2023

Dari model eksisting tersebut menunjukkan kurangnya perubahan positif dari aspek mentalitas, dan juga masih belum maksimalnya struktur dan fungsi dalam pendekatan sistemnya, serta kurang maksimalnya sinergitas dan simbiosis mutualisme diantara stakeholders kebijakan

pengelolaan sampah tersebut. Maka perlu dibangun model rekomendasi *MSN Approach* dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah dengan mendorong perubahan yang lebih positif dan berkelanjutan dari aspek mentality approach dari stakeholders kebijakan.

Begitu juga perlunya kolaborasi yang intensif dan integratif dalam aspek *system approach* guna menunjang optimalisasi struktur dan fungsi organisasi pelaksana kebijakan pengelolaan sampah ini. Pada aspek *networking approach* juga perlu memaksimalkan sinergitas dan simbiosis mutualisme diantara *stakeholders* guna mewujudkan kebersihan lingkungan dan peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan Nganjuk. Secara ringkas model rekomendasi yang ditawarkan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5.2. Model Rekomendasi MSN Approach Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2023

REFERENSI

- Cahyadi, A., Siati, & Fatih, A. Al. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Bank Sampah Di Kabupaten Purbalingga. *Demography Journal of Sriwijaya*, 2(2), 25–35.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. (2020). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal*. 1–9.
- Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. In *UNG Press Gorontalo*.
- Liando, M. A. S. D., & Sampe, S. (2017). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Dan Retribusi Pelayanan Kebershan Di Kota Manado. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis*. https://books.google.co.id/books?id=p0wXBAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=false.
- Mokodompis, Y., Kaunang, M., & Kasenda, V. (2019). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 1–12.
- Sari, P., Santoso, R. S., & Hanani, R. (2022). Determinan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus. *Journal of Public Policy and Management Review*, 11(2), 13–24.
- UMSU, A. (2019). *No Title(Mimpi) Medan Bebas Banjir, Macet, dan Sampah*. 06 Mei 2019. <https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/5/7/733081/mimpi-medan-bebas-banjir-macet-dan-sampah/>.
- Wachid, A., & Laksamana Caesar, D. (2020). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Kudus Policy Implementation of Waste Management in Kudus

- Regency. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 6(2), 173–183.
- Zahara, A., Nirzalin, N., & Bin Abubakar, M. (2021). Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.57>.